

Membangun Masyarakat Iran Modern di Bawah Naungan Wilayah Al-Faqih: Tinjauan Historis Transformasi Politik Pasca-Safawiyah

Misri A. Muchsin¹

UIN Ar-Raniry, Aceh, Indonesia¹

misri.muchsin@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji evolusi konsep pembangunan masyarakat Iran modern melalui tinjauan historis transformasi politik sejak era pasca-Safawiyah hingga tegaknya Republik Islam. Menggunakan pendekatan historis dan studi literatur, penelitian ini menyoroti pergeseran paradigma mengenai bagaimana sebuah peradaban modern dibangun dan dipertahankan di Iran. Konstruksi identitas sosio-politik yang diwariskan oleh Dinasti Safawiyah sempat mengalami pergeseran ekstrem pada era monarki pra-revolusi, di mana negara memaksakan proyek modernisasi sekuler yang berkiblat ke Barat. Agresivitas sekularisasi ini memicu kecemasan kolektif di kalangan masyarakat religius yang mengkhawatirkan hilangnya identitas Islam, serupa dengan model sekularisme Turki. Respons terhadap krisis identitas tersebut melahirkan redefinisi atas konsep "Iran Modern", yang mencapai puncaknya pada Revolusi Islam 1979 di bawah kepemimpinan Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat Iran modern pasca-revolusi tidak menolak modernitas instrumental, melainkan merekonstruksinya melalui doktrin *Wilayat al-Faqih* (kepemimpinan fukaha). Dalam payung sistem pemerintahan *Imamah Syi'ah* ini, konsep pembangunan negara diformat ulang untuk menyintesis struktur republik yang demokratis dengan otoritas teologis tertinggi di tangan ulama. Kesimpulannya, wujud masyarakat Iran modern saat ini adalah hasil dialektika perlawanan terhadap sekularisasi global, yang menghasilkan model pembangunan negara alternatif dengan menjadikan nilai-nilai spiritualitas Syi'ah sebagai fondasi utama kemajuannya.

Kata Kunci : Pembangunan Masyarakat; Iran Modern; Transformasi Politik; Wilayah al-Faqih; Imamah Syi'ah.

Abstract

This article examines the evolution of the concept of developing modern Iranian society through a historical review of political transformations from the post-Safavid era to the establishment of the Islamic Republic. Utilizing a historical approach and literature review, this research highlights the paradigm shift regarding how a modern civilization is built and sustained in Iran. The socio-political identity construction inherited from the Safavid Dynasty experienced an extreme shift during the pre-revolution monarchy era, where the state imposed a Western-oriented secular modernization project. The aggressiveness of this secularization triggered collective anxiety among the religious society, who feared the loss of their Islamic identity, akin to the Turkish secularism model. The response to this identity crisis led to a redefinition of the "Modern Iran" concept, culminating in the 1979 Islamic Revolution under the leadership of Imam Ayatollah Ruhullah Khomeini. The findings indicate that the post-revolution development of modern Iranian society does not reject instrumental modernity but reconstructs it through the doctrine of *Wilayat al-Faqih* (guardianship of the Islamic jurist). Under the umbrella of this Shia Imamate governance system, the concept of state development is reformatted to synthesize a democratic republican structure with supreme theological authority held by the ulama. In conclusion, the current manifestation of modern Iranian society is the result of a dialectic of resistance against global secularization, producing an alternative state development model that positions Shia spiritual values as the primary foundation for its progress.

Keywords : *Societal Development; Modern Iran; Political Transformation; Wilayah al-Faqih; Shia Imamate.*

Pendahuluan

Masyarakat Iran kontemporer memiliki fondasi identitas sosiopolitik yang berakar kuat pada warisan sejarah masa lalunya, terutama sejak era Dinasti Safawiyah (1501–1736). Dinasti ini memainkan peran monumental dalam sejarah Persia karena keberhasilannya menyatukan wilayah yang terfragmentasi sekaligus menjadikan doktrin Syi'ah Imam Dua Belas (*Itsna Asyariyah*) sebagai mazhab resmi negara (Axworthy, 2013; Savory, 1980). Keputusan strategis ini tidak hanya menciptakan batas demarkasi politik dengan Kesultanan Utsmaniyah yang bercorak Sunni di perbatasan barat, tetapi juga melahirkan perpaduan yang solid antara nasionalisme kultural Persia dan identitas teologis Syi'ah. Perpaduan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi "DNA" masyarakat Iran, di mana legitimasi kekuasaan politik dan struktur sosial mulai diukur dari kedekatannya dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan (Arjomand, 2012; Notosusanto, 1964).

Memasuki abad ke-20, lintasan sejarah Iran mengalami pergeseran radikal seiring dengan ambisi rezim monarki Pahlavi (1925–1979) yang berupaya memaksakan proyek modernisasi sekuler. Terinspirasi oleh model reformasi Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Reza Shah dan penerusnya, Mohammad Reza Pahlavi, memandang bahwa pembangunan masyarakat Iran yang "modern" hanya dapat dicapai melalui westernisasi secara total dan meminggirkan peran ulama dari ruang publik (Abrahamian, 1982). Upaya de-Islamisasi ini mencakup reformasi hukum, perombakan sistem pendidikan, hingga kebijakan sosial yang menekan simbol-simbol keagamaan. Meskipun secara makroekonomi dan infrastruktur Iran mengalami pertumbuhan pada dekade 1960-an hingga 1970-an, kebijakan otoriter ini memicu alienasi kultural yang mendalam. Masyarakat sosio-religius Iran dilingkupi kecemasan kolektif bahwa negara mereka akan mengalami krisis identitas laten dan terserap sepenuhnya ke dalam kutub sekularisme ekstrem (Keddie & Richard, 2006).

Krisis identitas dan represi politik tersebut mencapai titik didihnya pada akhir dekade 1970-an, melahirkan gelombang perlawanan masif yang menyatukan berbagai faksi masyarakat sipil. Puncak dari resistensi ini adalah Revolusi Islam 1979 yang dimotori oleh faksi ulama di bawah kepemimpinan karismatik Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini (Martin, 2003; Milani, 2018). Berbeda dengan narasi orientalis Barat yang kerap membingkai revolusi ini sebagai kemunduran ke era tradisionalisme konservatif, gerakan ini sejatinya merupakan sebuah upaya redefinisi atas konsep masyarakat modern itu sendiri. Khomeini dan para pemikir revolusioner tidak menolak kemajuan teknologi, birokrasi, maupun instrumen negara rasional; mereka justru

menolak premis tunggal bahwa modernitas harus selalu ekuivalen dengan sekularisme (Martin, 2003; Muchsin, 2002; Muchsin & Armi, 2023). Mereka berupaya membuktikan bahwa Iran mampu membangun peradaban yang maju, berdaulat, dan berbentuk republik, namun tetap berpijak kokoh pada fondasi syariat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan masyarakat modern alternatif tersebut, Khomeini merumuskan dan mengimplementasikan doktrin ketatanegaraan yang dikenal sebagai *Wilayat al-Faqih* (kepemimpinan atau perwalian fukaha). Sebuah istilah yang tersurat secara nyata tentang wewenang terukur bagi penjabatnya. Ukuran tersebut tidak hanya berpatokan pada kompetensinya sebagai seorang politikus ulung, namun memiliki *track record* di bidang ilmu-ilmu keislaman yang mendalam. Konsep ini merupakan inovasi progresif dalam tradisi politik Syi'ah kontemporer, di mana otoritas kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang ulama yang adil dan mumpuni (*Wali Faqih*) selama masa gaibnya Imam Mahdi (Moin, 1999; Sachedina, 1998).

Melalui doktrin ini, sistem pemerintahan Iran diformat ulang menjadi Republik Islam yang mengharmoniskan dan menawarkan upaya sintesis dua elemen esensial: kedaulatan rakyat (direpresentasikan melalui institusi kepresidenan, parlemen, dan pemilihan umum reguler) dengan kedaulatan ilahiah (diawasi oleh institusi *Rahbar* atau Pemimpin Tertinggi). Dalam konteks tata negara modern, *Wilayat al-Faqih* berfungsi sebagai poros sekaligus penjaga gawang ideologis yang memastikan bahwa arah pembangunan fisik dan sosial masyarakat tidak menyimpang dari kaidah agama (Bruinessen & Howell, 2007; Moin, 1999).

Hingga saat ini, literatur mengenai transformasi politik Iran pasca-revolusi cenderung didominasi oleh dua pendekatan utama: kajian kesejarahan murni yang berfokus pada kronologi jatuhnya monarki Pahlavi (Axworthy, 2013), atau analisis politik komparatif yang menyoroti gesekan antara elemen demokrasi dan teokrasi dalam struktur pemerintahan Iran (Ansari, 2012). Masih terdapat kesenjangan akademik dalam menganalisis bagaimana konsep "pembangunan masyarakat modern" itu sendiri direkonstruksi dan dioperasionalkan melalui kacamata Imamah Syi'ah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif evolusi konsep pembangunan masyarakat Iran modern melalui tinjauan historis dari era pasca-Safawiyah hingga tegaknya Republik Islam. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana sistem *Wilayat al-Faqih* memainkan peran sentral sebagai instrumen untuk menyintesis modernitas aparatus negara dengan nilai-nilai teologis, sehingga menciptakan paradigma pembangunan alternatif yang mandiri di tengah dominasi arus sekularisasi global.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada objek kajian yang menitikberatkan pada penelusuran peristiwa masa lampau serta analisis konseptual mengenai gagasan ketatanegaraan

Membangun Masyarakat Iran Modern Di Bawah Naungan Wilayah Al-Faqih: Tinjauan Historis Transformasi Politik Pasca-Safawiyah

dan transformasi sosial di Iran. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: pertama, pendekatan historis (historical approach) untuk melacak kronologi dan dinamika pergeseran politik dari era Dinasti Safawiyah, interupsi sekularisme Dinasti Pahlavi, hingga pecahnya Revolusi Islam 1979; kedua, pendekatan sosiologi politik dan teologi untuk membedah bagaimana doktrin Wilayah al-Faqih diimplementasikan sebagai instrumen pembangunan masyarakat modern.

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: sumber primer yang mencakup dokumen dan karya tulis konseptual dari tokoh utama, khususnya karya-karya pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini terkait pemerintahan Islam (*Wilayat al-Faqih*); dan sumber sekunder berupa literatur akademis yang otoritatif, meliputi buku-buku sejarah Timur Tengah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh para pakar sejarah dan politik Iran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan menghimpun, mengklasifikasi, dan mereduksi literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahapan sistematis: (1) Heuristik, pengumpulan literatur terkait peradaban Iran; (2) Kritik Sumber (Verifikasi), pengujian keabsahan literatur untuk menghindari bias orientalisme; (3) Interpretasi, penafsiran fakta sejarah untuk menemukan benang merah antara krisis sekularisme dengan munculnya konsep tata negara *Imamah Syi'ah*; dan (4) Historiografi, penyajian hasil analisis ke dalam bentuk tulisan sejarah yang analitis dan komprehensif (Moleong, 2018)

Pembahasan

Langkah awal dalam memahami konstruksi masyarakat Iran modern mengharuskan kita untuk melacak akar identitas sosiopolitiknya pada era Dinasti Safawiyah (1501–1736). Kebijakan monumental Shah Ismail I yang menetapkan *Syi'ah Itsna Asyariyah* (Dua Belas Imam) sebagai agama resmi negara merupakan titik balik yang mengubah lanskap demografis dan politik Persia secara permanen (Savory, 1980). Keputusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi politik untuk membedakan Persia dari rival utamanya, Kesultanan Utsmaniyah yang bercorak Sunni, tetapi juga menginisiasi proses institusionalisasi peran ulama dalam struktur negara.

Pada masa ini, terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara monarki dan institusi ulama. Ulama diberikan ruang luas untuk mengontrol sistem peradilan, pendidikan, dan urusan sosial kemasyarakatan (Arjomand, 2012). Integrasi mendalam antara nilai-nilai teologis *Syi'ah* dan nasionalisme kultural Persia inilah yang kemudian membentuk struktur batin masyarakat Iran. Identitas keagamaan menjadi elemen tak terpisahkan dari entitas bangsa, sehingga setiap upaya untuk meminggirkan peran agama dari ruang publik di kemudian hari akan

selalu memicu resistensi kultural dan sosiologis yang massif.

Transisi sejarah Iran memasuki fase krusial pada awal abad ke-20 dengan berkuasanya Dinasti Pahlavi (1925–1979). Mengadopsi model sekularisasi radikal yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Reza Shah Pahlavi dan penerusnya, Mohammad Reza Pahlavi, meyakini bahwa pembangunan masyarakat modern hanya dapat dicapai melalui westernisasi yang menyeluruh (Abrahamian, 1982). Rezim ini mengimplementasikan kebijakan de-Islamisasi yang agresif, seperti pelarangan penggunaan hijab di ruang publik, pengambilalihan sistem peradilan dan pendidikan dari tangan ulama, hingga perombakan kalender Islam. (Hashemi et al., 2025)

Meskipun secara makroekonomi Iran mengalami pertumbuhan pesat, terutama didorong oleh ledakan pendapatan minyak dan program White Revolution (Revolusi Putih) pada 1963, modernisasi otoriter ini menghasilkan alienasi yang mendalam. Masyarakat bazaar (kelas menengah pedagang tradisional) dan kaum religius merasa terpinggirkan oleh elite sekuler yang korup dan sangat bergantung pada kekuatan asing. Bias proyek modernisasi ini memicu disonansi kognitif di tengah masyarakat yang secara historis terikat erat pada institusi agama (Keddie & Richard, 2006). Kecemasan kolektif bahwa identitas kultural dan spiritual Iran akan tergerus habis oleh arus sekularisme ekstrem inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi perlawanan di dekade berikutnya.

Krisis identitas dan represi politik rezim Pahlavi mencapai puncaknya pada Revolusi Islam 1979. Gerakan massif ini dimotori oleh faksi ulama di bawah kepemimpinan Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini. Signifikansi sejarah dari revolusi ini bukanlah kembalinya Iran ke era pra-modern, melainkan sebuah redefinisi atas konsep "masyarakat modern" itu sendiri. Khomeini berhasil mendekonstruksi narasi orientalis dan sekuler yang selalu mempertentangkan Islam dengan kemajuan zaman (Milani, 2018).

Dalam pandangan para ideolog revolusi, modernitas tidak harus ekuivalen dengan pelepasan nilai-nilai agama. Mereka memobilisasi massa bukan untuk menolak instrumen negara rasional, melainkan untuk merebut kembali narasi pembangunan dari tangan rezim sekuler (Martin, 2003). Penghapusan sistem monarki dan pembentukan "Republik" merupakan bukti bahwa faksi ulama mengadopsi struktur politik modern. Namun, struktur modern tersebut tidak diisi dengan ideologi sekuler, melainkan diinjeksi dengan nyawa teologis syariat Islam. Ini adalah tonggak awal terbentuknya sintesis antara bentuk negara modern dan nilai-nilai fundamental keagamaan.

Untuk mewujudkan visi masyarakat modern yang religius, Ayatullah Khomeini merumuskan dan mengoperasionalkan doktrin ketatanegaraan *Wilayah al-Faqih* (Perwalian Ulama/Fukaha). Secara teologis, konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa selama masa

gaibnya Imam Mahdi (Imam ke-12), otoritas kepemimpinan politik dan keagamaan umat harus dipegang oleh seorang Faqih (ahli hukum Islam) yang adil, bertakwa, dan memiliki kapabilitas manajerial (Khomeini, 1981; Sachedina, 1998).

Dalam praktiknya, doktrin ini menjadi episentrum struktur ketatanegaraan Republik Islam Iran, menciptakan model pemerintahan unik yang menyintesis elemen demokrasi representatif dengan teokrasi. Sebagaimana terlihat dalam arsitektur ketatanegaraannya, kedaulatan rakyat difasilitasi melalui institusi-institusi modern yang dipilih melalui pemilihan umum, seperti Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan Majlis (Parlemen) sebagai lembaga legislatif. Namun, untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum dan arah pembangunan masyarakat tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi Islam, kedaulatan ilahiah dilembagakan melalui institusi Rahbar (Pemimpin Tertinggi) dan Dewan Garda (Guardian Council) (Ansari, 2012).

Peran sentral Rahbar dalam kerangka *Wilayat al-Faqih* bukan sekadar simbolik, melainkan berfungsi sebagai penjaga gawang ideologis (ideological gatekeeper). Kepemimpinan ulama memastikan bahwa modernisasi birokrasi, inovasi teknologi, dan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah (Presiden dan kabinetnya) tetap berada dalam koridor kemandirian nasional dan nilai-nilai etika Islam (Moin, 1999). Melalui sistem ini, masyarakat Iran modern tidak sekadar bertahan dari gempuran sekularisasi global, tetapi berhasil membangun paradigma alternatif: sebuah negara republik yang berdaulat, demokratis secara prosedural, namun tetap tunduk pada otoritas spiritual Imamah Syi'ah.

Hal ini menunjukkan bahwa Iran memiliki *positioning* yang sangat unik dalam menghadapi ancaman perang yang dilayangkan oleh Trump dan sekutunya. *Positioning* unik Iran dalam menghadapi ancaman perang dari Amerika Serikat—khususnya selama era kampanye "Tekanan Maksimum" (Maximum Pressure) yang digagas oleh Donald Trump dan sekutunya—merupakan manifestasi langsung dari sintesis antara ideologi *Wilayat al-Faqih* dan pragmatisme geopolitik. Alih-alih merespons ancaman dengan kepatuhan mutlak atau konfrontasi militer konvensional yang bunuh diri, Republik Islam Iran mengembangkan doktrin pertahanan yang sangat adaptif.

Iran menyadari bahwa secara kekuatan militer konvensional dan anggaran pertahanan, mereka tidak dapat mengimbangi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Iran memosisikan dirinya secara unik melalui doktrin perang asimetris. Strategi utamanya adalah membangun jaringan proksi atau aliansi non-negara yang dikenal sebagai Axis of Resistance (Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, dan berbagai milisi Syi'ah di Irak seperti Hashd al-Shaabi). Ketika AS dan sekutunya menekan Iran, Iran tidak perlu menyerang langsung secara konvensional. Mereka menggunakan jaringan proksinya untuk memberikan tekanan balik yang

terukur di seluruh wilayah Timur Tengah, membuat biaya politik dan militer bagi AS menjadi terlalu mahal jika memicu perang terbuka (Tabatabai, 2020).

Ketika pemerintahan Trump secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan (Maximum Pressure), sekutu Barat memperkirakan Iran akan runtuh dari dalam atau memohon negosiasi baru. Iran merespons dengan kebijakan Maximum Resistance (Perlawanan Maksimum). Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei menolak negosiasi di bawah ancaman. Secara bertahap, Iran justru meningkatkan pengayaan uraniumnya melampaui batas JCPOA sebagai alat tawar geopolitik, menunjukkan bahwa tekanan sanksi tidak akan mendikte kebijakan keamanan nasional mereka (Nephew, 2017).

Iran memiliki positioning yang sangat unik dalam menakar eskalasi. Mereka tidak segan untuk menyerang balik, tetapi serangannya selalu diukur agar tidak memicu perang total (all-out war). Bukti paling nyata adalah respons Iran terhadap pembunuhan Mayor Jenderal Qasem Soleimani (Komandan Pasukan Quds IRGC) oleh drone AS atas perintah Donald Trump pada Januari 2020. Iran merespons dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer Ayn al-Asad yang menampung pasukan AS di Irak (Operasi Martir Soleimani). Serangan ini sangat unik karena Iran memberikan peringatan dini kepada pemerintah Irak (yang kemudian diteruskan ke AS) sehingga tidak ada korban jiwa secara langsung dari militer AS, namun secara psikologis dan strategis Iran berhasil menunjukkan kemampuan rudal presisinya sekaligus menyelamatkan wajah politik di dalam negeri (Ostovar, 2016; Taleblu, 2023)

Iran memosisikan Selat Hormuz, rute yang dilalui oleh sekitar 20% pasokan minyak dunia, sebagai "kartu truf". Setiap kali Trump atau Israel mengancam akan melakukan serangan militer ke fasilitas nuklir Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merespons dengan unjuk kekuatan angkatan laut, latihan militer, atau sabotase tak bertujuan terhadap kapal tanker di perairan Teluk. Ini mengirimkan pesan jelas kepada komunitas internasional: jika Iran tidak bisa mengekspor minyaknya karena sanksi atau perang, maka tidak ada satu pun negara di kawasan tersebut yang bisa mengekspor minyak.

Dalam kajian sosiologi politik, tekanan eksternal sering kali menjadi katalis utama bagi sebuah negara untuk merestrukturisasi ulang struktur sosial dan ekonominya. Sebagai respons langsung terhadap kampanye "Tekanan Maksimum" AS dan isolasi finansial global, struktur kepemimpinan Wilayah al-Faqih tidak hanya merumuskan strategi militer, tetapi juga merestrukturisasi ulang konsep pembangunan masyarakatnya. Hal ini diwujudkan melalui doktrin Ekonomi Perlawanan (*Iqtisade Muqawamati*) yang dicanangkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei pada awal dekade 2010-an. Alih-alih membiarkan masyarakat runtuh akibat

hiperinflasi dan kelangkaan barang impor, negara memobilisasi masyarakat untuk beralih dari ekonomi berbasis rente minyak (oil-rentier state) menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan produksi domestik (Salehi-Isfahani, 2019). Konsep pembangunan masyarakat ini menekankan kemandirian (swasembada) di sektor-sektor vital strategis.

Fakta sosiologisnya, blokade Barat justru memaksa Iran untuk mempercepat investasi besar-besaran di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (STEM). Pembangunan masyarakat Iran modern kini ditandai dengan pencapaian otonom di bidang nanoteknologi, kedirgantaraan, teknologi nuklir sipil, hingga produksi bio-farmasi (Harris, 2017). Melalui pencapaian ini, sistem Wilayah al-Faqih ingin membuktikan sebuah premis ideologis kepada warganya: bahwa masyarakat Islam dapat mencapai tingkat rasionalitas dan modernitas saintifik tertinggi tanpa harus tunduk pada hegemoni politik dan ekonomi Barat.

Namun demikian, analisis pembangunan masyarakat Iran tidak akan objektif tanpa melihat paradoks yang dihasilkan oleh kebijakan negara itu sendiri. Keberhasilan Republik Islam dalam memberantas buta huruf, memperluas akses universitas (di mana mayoritas mahasiswanya kini adalah perempuan), dan mendorong urbanisasi massal justru melahirkan kelas menengah baru yang sangat kritis (Bayat, 2021; Nabila Rasha & Mikraj Mikraj, 2025).

Masyarakat Iran modern pasca-revolusi adalah masyarakat yang terdidik, terhubung secara digital (meskipun ada sensor), dan memiliki aspirasi global. Kondisi ini melahirkan friksi atau dialektika baru antara masyarakat sipil yang dinamis dan struktur negara yang ideologis. Gerakan-gerakan sosial kontemporer, seperti protes ekonomi maupun tuntutan pelanggaran aturan hijab, merupakan produk sampingan dari keberhasilan pembangunan sumber daya manusia Iran itu sendiri (Khosrokhavar, 2018). Generasi muda dan kaum perempuan yang kini memiliki kapasitas intelektual dan otonomi ekonomi mulai menuntut ruang partisipasi politik yang lebih inklusif dan re-interpretasi atas batasan-batasan syariat dalam ruang publik.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat Iran di bawah *Wilayah al-Faqih* bukanlah entitas yang statis. Ia terus berdialektika: di satu sisi masyarakat bersatu menahan ancaman eksternal AS dan sanksi Barat, namun di sisi lain, masyarakat yang semakin modern ini terus menegosiasikan kontrak sosialnya dengan para pemimpin agama di dalam negeri.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan historis dan analisis ketatanegaraan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa evolusi pembangunan masyarakat Iran modern bukanlah sebuah proses linier yang sekadar meniru model modernisasi Barat, melainkan hasil dari dialektika panjang antara identitas religius dan interupsi sekularisme. Fondasi sosiopolitik yang diwariskan oleh Dinasti Safawiyah—yang menyatukan entitas Persia dengan doktrin Syi'ah *Itsna Asyariyah*—telah mengakar

terlalu dalam pada struktur batin masyarakat Iran. Oleh karena itu, proyek sekularisasi paksa yang dijalankan oleh rezim Pahlavi pada abad ke-20 gagal menciptakan masyarakat modern yang seutuhnya, dan justru memicu krisis identitas serta resistensi sosiologis karena mengabaikan realitas kultural bangsa tersebut.

Revolusi Islam 1979 di bawah kepemimpinan Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini menjadi titik balik krusial yang meredefinisi konsep "Iran Modern". Revolusi ini membuktikan bahwa penolakan terhadap sekularisme ekstrem tidak ekuivalen dengan penolakan terhadap kemajuan zaman. Melalui penerapan doktrin Wilayah al-Faqih yang berakar pada konsep Imamah Syi'ah, Iran berhasil merumuskan paradigma pembangunan alternatif. Sistem ini secara unik menyintesis dua kutub yang sering dianggap bertolak belakang: struktur negara republik yang demokratis secara prosedural dan otoritas teokrasi. Dalam arsitektur ketatanegaraan ini, kepemimpinan ulama (Rahbar) berperan sebagai poros utama dan penjaga gawang ideologis yang memastikan bahwa segala bentuk modernisasi, baik dari segi infrastruktur, birokrasi, maupun sains, tetap terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan negara di dunia Islam sangat bergantung pada kemampuannya menyelaraskan instrumen modernitas dengan kearifan dan identitas teologis lokal, alih-alih sekadar mengimpor model sekularisme asing. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih empiris mengenai bagaimana struktur *Wilayah al-Faqih* beradaptasi dalam menghadapi tantangan kontemporer geopolitik dan pergeseran nilai generasi muda Iran.

Daftar Pustaka

- Abrahamian, E. (1982). *Iran between two revolutions* (Number Princeton University Press). Princeton University Press. <https://www.marxists.org/subject/iran/abrahamian/between-2-revolutions.pdf>
- Ansari, A. M. (2012). *The politics of nationalism in modern Iran* (Vol. 40). Cambridge University Press.
- Arjomand, S. A. (2012). *The Shadow of God and the Hidden Imam: religion, political order, and societal change in Shi'ite Iran from the beginning to 1890*. University of Chicago Press.
- Axworthy, M. (2013). *Revolutionary Iran: a history of the Islamic republic*. Oxford University Press.
- Bayat, A. (2021). *Revolutionary life: The everyday of the Arab Spring*. Harvard University Press.
- Bruinessen, M. Van, & Howell, J. D. (2007). Sufism and the "modern" in islam. In M. Van Bruinessen & J. D. Howell (Eds.), *I.B. TAURIS & Co Ltd*. (1st ed.).
- Harris, K. (2017). A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran. In *A Social Revolution*. <https://doi.org/10.1525/9780520965843>
- Hashemi, S. H., Shahsani, S., Shamshiri, B., Izadpanah, A., & Enayat, H. (2025). Identifying and Analyzing the Discourses of Modern Education and Training of Women in the Context of the first Pahlavi Modernization (1921-1941). *Journal of Woman in Culture and Arts*, 17(3), 305–324.
- Keddie, N. R., & Richard, Y. (2006). *Modern Iran: Roots and results of revolution* (Vol. 3). Yale university press.

Membangun Masyarakat Iran Modern Di Bawah Naungan Wilayah Al-Faqih: Tinjauan Historis Transformasi Politik Pasca-Safawiyah

- Khomeini, R. (1981). *Islam and revolution: writings and declarations of Imam Khomeini*. Berkeley,[Calif.]: Mizan Press.
- Martin, V. (2003). *Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of a New Iran*. Bloomsbury Academic. <https://books.google.co.id/books?id=O13vs8Drp6QC>
- Milani, M. M. (2018). *The making of Iran's Islamic revolution: from monarchy to Islamic republic*. Routledge.
- Moin, B. (1999). *Khomeini: Life of the Ayatollah*. St. Martin's Press. <https://books.google.co.id/books?id=b2OL9IEXaAgC>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. In PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, M. A. (2002). *Filsafat Sejarah dalam Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia.
- Muchsin, M. A., & Armi, F. (2023). Religious Practices of the Teuku Raja Ubiet Community Group in Gunong Kong Nagan Raya Aceh. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 17(17(2)), 217-231.
- Nephew, R. (2017). *The art of sanctions: A view from the field*. Columbia University Press.
- Notosusanto, N. (1964). *Hakikat Sejarah dan Model Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.
- Ostovar, A. (2016). *Vanguard of the Imam: religion, politics, and Iran's revolutionary guards*. Oxford University Press.
- Nabila Rasha, & Mikraj Mikraj. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim dan Problematika Pengembangannya. *Al-Ukhwah - Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 176-187. <https://doi.org/10.47498/jau.v4i2.6336>
- Sachedina, A. A. (1998). *The just ruler in Shi'ite Islam: the comprehensive authority of the jurist in Imamite jurisprudence*. Oxford University Press.
- Savory, R. (1980). *Iran under the Safavids*. Cambridge university press.
- Tabatabai, A. M. (2020). *No conquest, no defeat: Iran's national security strategy*. Oxford University Press.
- Taleblu, B. Ben. (2023). Assessing the Islamic Republic of Iran's Ballistic Missile Program. *Foundation for Defense of Democracies (FDD)*.